

PETA MUTU PENDIDIKAN

JENJANG SMA PROVINSI BALI

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2018

Oleh :

Dr. Ni Made Suciani, M.Pd.

I Wayan Darsana, M.Pd, M.Si.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BALI
2019**

**PETA MUTU PENDIDIKAN
JENJANG SMA PROVINSI BALI**

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2018

ISBN : 978-623-7441-01-4

Oleh :

Dr. Ni Made Suciani, M.Pd.
I Wayan Darsana, M.Pd, M.Si.

Editor :

I Made Alit Dwitama, ST, M.Pd.

Desain Sampul :

Heru Susanto

Tata Letak :

Gus Ryan

Penerbit :

LPMP BALI
Anggota IKAPI No. 018/BAI/16

Redaksi:

Jl. Letda Tantular No. 14 Niti Mandala Denpasar 80234
Telp. 0361 225666, Fax. 0361 246682
Pos-el : lpmpbali@kemdikbud.go.id
Laman : lpmpbali.kemdikbud.go.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, peta mutu pendidikan jenjang SMA Provinsi Bali dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Saya menyambut baik dengan adanya peta capaian mutu pendidikan jenjang SMA Provinsi Bali, sehingga dapat dijadikan dasar oleh pemerintah Provinsi Bali dalam peningkatan mutu pendidikan jenjang SMA. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, yang telah berpartisipasi dalam penyusunan peta mutu pendidikan jenjang SMA Provinsi Bali.
2. TPMPD Provinsi Bali yang telah bekerja keras mewujudkan capaian peta mutu pendidikan jenjang SMA Provinsi Bali.
3. Widyaiswara LPMP Bali yang telah berkontribusi secara akademis dalam pembuatan peta mutu pendidikan jenjang SMA Provinsi Bali.

Peta mutu pendidikan jenjang SMA Provinsi Bali, dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan jenjang SMA di Provinsi Bali.



Kepala LPMP Bali,

I Made Alit Dwitama, S.T., M.Pd.

NIP 19741225 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan	3
D. Manfaat	3

BAB II PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

A. Mutu Pendidikan	4
B. Indikator Mutu Pendidikan	6
C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan	9
D. Sumber Data Peta Capaian SNP.....	19
E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP	19

BAB III HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SMA PROVINSI BALI

A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018	20
B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan.....	24
C. Analisis Capaian Standar Isi.....	27
D. Analisis Capaian Standar Proses	31
E. Analisis Capaian Standar Penilaian.....	34
F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	37
G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana	40
H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan	42
I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan	44
J. Permasalahan dalam Penyusunan Peta Mutu Pendidikan	47
K. Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan	48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	53
B. Rekomendasi	53

DAFTAR PUSTAKA	56
----------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.....	7
Gambar 2.1	Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	8
Gambar 2.3	Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP	9
Gambar 3.1	Data Responden pada Rapor Mutu Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018	22
Gambar 3.2	Capaian Rapor Mutu Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018	23
Gambar 3.3	Grafik radar capaian mutu SNP jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018	24
Gambar 3.4	Grafik capaian indikator SKL Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen	10
Tabel 3.1	Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018	20
Tabel 3.2	Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018	21
Tabel 3.3	Capaian SNP pada Level Tertentu pada Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018	22
Tabel 3.4	Capaian SNP Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018	23
Tabel 3.5	Capaian SKL Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018	25
Tabel 3.6	Capaian Standar Isi Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018	28
Tabel 3.7	Capaian Standar Proses Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018	31
Tabel 3.8	Capaian Standar Penilaian Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018	34
Tabel 3.9	Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018	37
Tabel 3.10	Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018	41
Tabel 3.11	Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018	42
Tabel 3.12	Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018	45

**BAB
I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diamanatkan bahwa setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah (whole school approach). Sebagai langkah awal rangkaian kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan harus mampu melakukan penyusunan peta mutu. Penyusunan peta mutu ini diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencapai dan bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat

dan benar. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai base-line data untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Sekolah/Madrasah adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Salah satu alat untuk mengkaji kemajuan peningkatan mutu sekolah secara komprehensif yang berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS sebagai salah satu komponen SPMP diharapkan dapat membangun semangat dan kultu penjaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hasil pemetaan mutu pendidikan tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk dapat menghasilkan peta mutu dan rekomendasi program peningkatan mutu yang tepat sebagai upaya pemenuhan 8 (delapan) SNP di tingkat sekolah. Berbagai rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pemetaan mutu pendidikan kemudian perlu dituangkan ke dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS), untuk jangka waktu menengah, dan RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) yang merupakan jangka pendek setiap tahun. Pemetaan mutu pendidikan diverifikasi oleh Pengawas Sekolah selaku pembina sekolah tersebut. Kegiatan agregasi dan analisis pemetaan mutu pendidikan dilakukan untuk mendapatkan peta tentang capaian 8 (delapan) SNP. Dari hasil analisis ini akan didapat gambaran tentang tahapan pengembangan setiap indikator dari setiap SNP untuk setiap jenjang pendidikan. Analisis ini akan menghasilkan peta mutu dan berbagai rekomendasi yang akurat dan bermanfaat bagi pemerintah kota/kabupaten/ provinsi untuk dasar perencanaan program peningkatan mutu pendidikan di tingkat kota/kabupaten/ provinsi yang perlu dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Agregasi data pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian strategi yang dilaksanakan oleh tim penjaminan mutu pendidikan daerah/pengawas sekolah tingkat Pemerintah Daerah untuk memonitor dan mengevaluasi mutu dan keefektifan sekolah dan tenaga kependidikan berdasarkan SNP. Hasil agregasi ini menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah provinsi sesuai kewenangannya untuk dapat dipahami dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga menjadi suatu budaya mutu di tingkat, provinsi maupun tingkat pusat. Hal ini sesuai dengan peran Pemerintah Daerah Provinsi dalam Sistem Pendidikan Nasional, dalam hal: (1) menyediakan pelayanan pendidikan; (2) memonitor mutu pendidikan dan pelayanan pendukung pendidikan; (3) membuat laporan mengenai mutu dan kinerja sekolah; dan (4) meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan. Peta mutu pendidikan ini memaparkan peta capaian mutu SNP Provinsi Bali untuk setiap jenjang pendidikan. Peta capaian mutu SNP dibuat sebagai perwujudan tugas dan wewenang LPMP Bali dalam memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

B. Acuan Formal dan Normatif

Peta mutu pendidikan di Provinsi Bali didasari oleh dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tujuan

Tujuan disusunnya analisis peta mutu pendidikan (capaian Standar Nasional Pendidikan) Provinsi Bali adalah untuk mengetahui gambaran ketercapaian mutu pendidikan Provinsi Bali serta analisisnya, dan untuk menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat Provinsi Bali berdasarkan pemetaan mutu pendidikan dengan harapan dapat mendorong satuan pendidikan maupun pemerintah daerah mengimplementasikan SPMP dengan baik dan berkelanjutan.

D. Manfaat

Pada akhirnya nanti, analisis peta capaian mutu SNP ini diharapkan dapat menjadi baseline pelaksanaan SPMP sebagai elemen esensial peningkatan mutu pendidikan sehingga SPMP dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016.

**BAB
II****PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN****A. Mutu Pendidikan**

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/ upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible maupun yang intangible. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif dan psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah serta dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah dan manajemen kelas berfungsi untuk mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antar guru, siswa dan sarana pendukung di kelas.

Satori (2016) menyatakan bahwa mutu pendidikan adalah nilai dan manfaat yang sesuai dengan standar nasional pendidikan atas input, proses, output, dan outcome pendidikan yang dirasakan oleh pemakai jasa pendidikan dan pengguna hasil pendidikan. Memahami pengertian tentang mutu pendidikan selalu mengedepankan keadaan dan hasil pendidikan yang berada di masyarakat seperti Danim (2002) berpendapat bahwa kualitas pendidikan dilihat dari hasil pendidikan dianggap bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler. Di luar kerangka itu mutu keluaran juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh peserta didik selama mengikuti pendidikan. Djaali (2014) secara spesifik menyatakan bahwa ukuran mutu pendidikan adalah (1) kompetensi lulusan yang dinyatakan dengan pencapaian kompetensi dasar esensial minimal; (2)

kualitas proses pembelajaran di kelas dan proses pendidikan di sekolah. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah nilai tertinggi dari input, proses, output dan outcome pendidikan, dalam kaitannya dengan pemenuhan standar nasional pendidikan, mutu pendidikan diukur melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Berkaitan dengan pemetaan mutu, Satori (2016) menyatakan bahwa pemetaan mutu adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan peta mutu pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara, pemerintah daerah, dan pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Mutu pendidikan Indonesia dinilai berdasarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan. Jadi pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas SNP dalam suatu kurun waktu yang ditentukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah untuk menghasilkan peta mutu pendidikan.

Peta mutu adalah representasi visual yang menyoroti profil mutu satuan pendidikan dalam wilayah tertentu yang menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan. Dengan kata lain peta mutu diperoleh dari suatu proses pemetaan berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan dengan output berupa profil mutu yang di tingkat berikutnya diintegrasikan dalam batasan wilayah tertentu.

Pengumpulan data dan informasi dari profil satuan pendidikan idealnya dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan karena pada hakikatnya sebuah peta harus dapat memberikan informasi bagi penggunanya untuk dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Sebagai sebuah media informasi peta mutu harus memiliki kemudahan bagi penggunanya, kemudahan yang dimaksud berarti adanya kejelasan informasi dan tingkat keterbacaan peta yang cukup tinggi. Untuk itu suatu peta mutu diharapkan dapat disajikan dalam tampilan yang menarik, dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif supaya tujuan pembuatan peta mutu dapat tercapai.

Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (baseline data) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian ke-8 SNP dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Sumber data dari penyusunan peta mutu di tiap tingkatan wilayah adalah data profil di tingkat satuan pendidikan yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif kondisi satuan pendidikan dalam lingkup standar nasional pendidikan. Agregasi profil satuan pendidikan di tingkat selanjutnya diharapkan dapat disusun untuk menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan untuk mendorong satuan pendidikan dalam melakukan upaya penjaminan mutu. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyusun profil capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan adalah instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS dapat digunakan satuan pendidikan untuk mengumpulkan data entitas satuan pendidikan dan data kualitas layanan pendidikan dengan acuan SNP.

Sebuah siklus dalam konteks sistem penjaminan mutu mensyaratkan output

proses pemetaan yang berupa peta mutu pendidikan dapat menjadi input bagi proses peningkatan mutu berkelanjutan. Secara operasional proses peningkatan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal berupa program supervisi dan fasilitasi kepada satuan pendidikan. Penyusunan program supervisi dan fasilitasi dalam berbagai bentuknya dapat dilakukan apabila peta mutu yang disusun dapat digunakan sesuai kebutuhan. Untuk itu peta mutu pendidikan berbasis hasil capaian SNP hendaknya dapat dikembangkan menjadi peta dengan tema-tema tertentu yang lebih spesifik sesuai data dan informasi yang ada dalam profil satuan pendidikan. Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (baseline data) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Secara khusus tujuan penyusunan peta mutu dapat diturunkan dalam tingkat wilayah sebagai berikut.

1. Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan agregasi profil mutu satuan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pendidikan di wilayah kabupaten/ kota.
2. Pemerintah provinsi dapat melakukan pemetaan mutu di daerahnya dan menggunakannya sebagai dasar dalam penyusunan peraturan daerah tentang pendidikan, perencanaan program dan penganggaran pendidikan, dan koordinasi antarkabupaten/kota dalam pelayanan pendidikan yang bermutu
3. Pemerintah dapat menggunakan profil mutu satuan pendidikan untuk menyusun peta mutu pendidikan nasional sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengalokasian anggaran di sektor pendidikan.

Secara visual peta mutu dapat disajikan dalam berbagai bentuk diagram, carta (daftar), matriks dan narasi dari data dan informasi yang ditampilkan. Sebagai agregat dari sejumlah profil dalam satu wilayah, visualisasi komperatif dari data dan informasi antar profil menjadi suatu alternatif informasi yang dapat ditampilkan dalam peta mutu pendidikan.

B. Indikator Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah. Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak ada peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu

secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Bertujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sistem penjaminan mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
(Permendikbud No. 28 Tahun 2016)

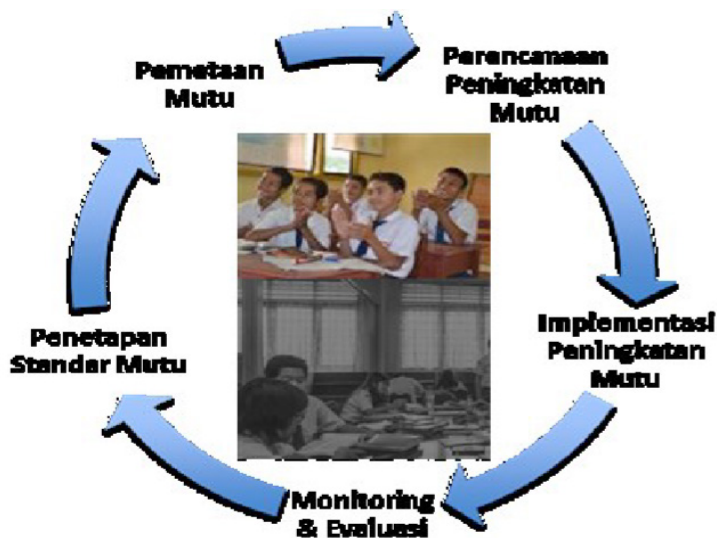
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan, sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan, sedangkan sistem informasi penjaminan mutu yang menunjang implementasi kedua sistem di atas.

Sistem mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas.

1. Penetapan standar sebagai landasan dimana Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi
2. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan
3. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah

4. Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam program kerja maupun proses pembelajaran; dan
5. Evaluasi/audit terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan Kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk Kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan bermutu.

Secara lengkap kelima siklus tersebut disajikan dalam gambar berikut.

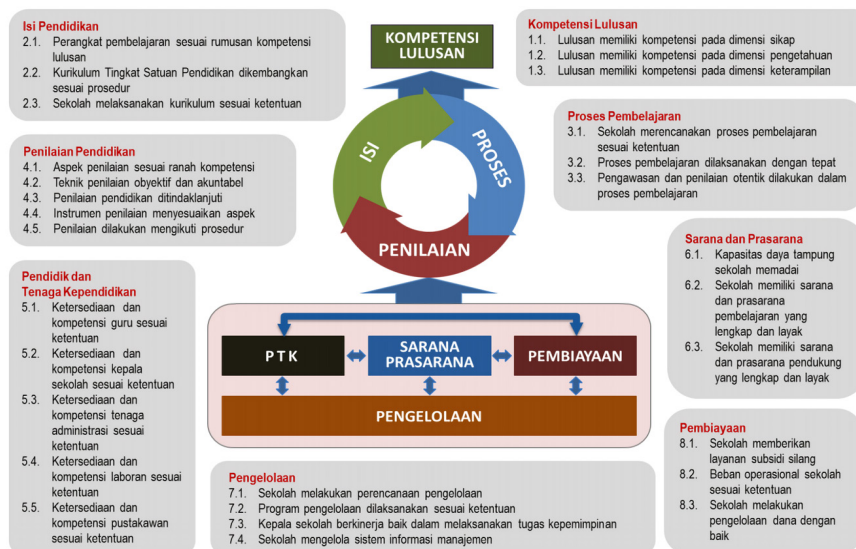


Gambar 2.2 Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Seluruh siklus ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Sementara siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas: (1) pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (2) perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis; (3) fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; (4) monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; (5) penetapan dan evaluasi Standar Nasional Pendidikan; dan (6) pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian. Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga standardisasi (BSNP) dan lembaga akreditasi BAN S/M atau lembaga akreditasi mandiri sesuai kewenangan masing-masing. Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Penilaian, (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Sarana dan Prasarana, dan (8) Standar Pembiayaan.

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan output. Standar Kompetensi Lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan

terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi input dan proses dideskripsikan dalam bentuk hubungan sebab-akibat dengan output. Standar dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan. Secara ringkas indikator mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3 Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP

C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan

Pelaksanaan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait pada satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Sarana dan Prasarana; dan (8) Standar Pembiayaan. Pengumpulan data mutu pendidikan Tahun 2017 berdasarkan 8 SNP dilaksanakan pada pertengahan tahun melalui aplikasi PMP yang merupakan bagian dari aplikasi Dapodik. Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan yang digunakan dalam program SPMP Tahun 2018 terdiri dari 8 (delapan) SNP yang tertuang dalam 28 indikator dan 189 sub indikator, yaitu.

Tabel 2.1 Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
1	Standar Kompetensi Lulusan	1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
				1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berakhlak
				1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin
				1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun
				1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur
				1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli
				1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri
				1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab
				1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat
				1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani
		1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
		1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif
				1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif
				1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis
				1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri
				1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif
				1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
2	Standar Isi	2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap
				2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan
				2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan
				2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa
				2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran
		2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum
				2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan
				2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan
				2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan
		2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku
				2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi
				2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal
				2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa
3	Standar Proses	3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan
				3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi
				3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis
				3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan
				3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran
				3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu
				3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah
				3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi
				3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu
				3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
				3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif
				3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat
				3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.
				3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.
				3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa
				3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran
				3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar
				3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran
		3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif
				3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik
				3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran
				3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru
				3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran
				3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan
				4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah
		4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel
				4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap
		4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian
				4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik
		4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap
				4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan
				4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan
		4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur
				4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur
				4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4
				5.1.2.	Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang
				5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran
				5.1.4.	Bersertifikat pendidik
				5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik
				5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik
				5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4
				5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan
				5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan
				5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara
				5.2.5.	Bersertifikat pendidik
				5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah
				5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik
				5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik
				5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik
				5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
		5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi
				5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat
				5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat
				5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi
				5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan
				5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik
				5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik
				5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium
				5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai
				5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat
				5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai
				5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran
				5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
				5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran
				5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
				5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik
				5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik
				5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik
		5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan
				5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai
				5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat
				5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai
				5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan
				5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan
				5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik
				5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik
				5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik
				5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
				5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai
				6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan
		6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar
				6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar
				6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar
				6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar
				6.2.5.	Memiliki laboratorium biologi sesuai standar
				6.2.6.	Memiliki laboratorium fisika sesuai standar
				6.2.7.	Memiliki laboratorium kimia sesuai standar
				6.2.8.	Memiliki laboratorium komputer sesuai standar
				6.2.9.	Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar
				6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai
				6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai
				6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai
				6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai
				6.2.14.	Kondisi laboratorium biologi layak pakai
				6.2.15.	Kondisi laboratorium fisika layak pakai
				6.2.16.	Kondisi laboratorium kimia layak pakai
				6.2.17.	Kondisi laboratorium komputer layak pakai
				6.2.18.	Kondisi laboratorium bahasa layak pakai

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar
				6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar
				6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar
				6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar
				6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar
				6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar
				6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar
				6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar
				6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar
				6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar
				6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak
				6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai
				6.3.13.	Menyediakan unit kewirausahaan dan bursa kerja
				6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai
				6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai
				6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai
				6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai
				6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar
				6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai
				6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai
				6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai
				6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai
				6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan
				7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan
				7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap
				7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan
				7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan
				7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri
				7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan
				7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran
		7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik
				7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan
				7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik
				7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik
				7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan
				7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik
		7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan
8	Standar Penerimaan	8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu
				8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas
				8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu
		8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan
		8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya
				8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana
				8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan

D. Sumber Data Peta Capaian SNP

Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2018 ini diperoleh dari data yang terkumpul dan dipublikasikan secara lengkap pada bulan Juni 2019 baik data yang bersumber dari Dapodik (dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id) maupun data yang bersumber dari PMP (pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id). Capaian meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Sarana dan Prasarana, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) Standar Pembiayaan.

E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP

Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0 – 7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis, yaitu:

1. Menuju SNP level 1 : skor $< 2,04$
2. Menuju SNP level 2 : $2,04 \leq \text{skor} < 3,70$
3. Menuju SNP level 3 : $3,70 \leq \text{skor} < 5,07$
4. Menuju SNP level 4 : $5,07 \leq \text{skor} < 6,67$
5. SNP : $6,67 \leq \text{skor} \leq 7,00$

BAB III

HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SMA PROVINSI BALI

A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018

Pada bagian ini akan disajikan capaian SNP secara umum dan perbandingannya dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018. Sebelumnya juga akan dipaparkan progres pengiriman data baik pada data PMP maupun Dapodik tahun 2018 sebagai dasar analisis rapor mutu daerah.

1. Progres Pengiriman Data pada Dapodik Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018

Tabel 3.1 Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018

No	Wilayah	%	Total Sekolah	Total Kirim	Total Sisa
1	Kab. Gianyar	100%	12	12	0
2	Kab. Jembrana	100%	13	13	0
3	Kab. Karang Asem	100%	18	18	0
4	Kab. Klungkung	100%	11	11	0
5	Kab. Tabanan	100%	14	14	0
6	Kab. Badung	100%	20	20	0
7	Kab. Bangli	100%	6	6	0
8	Kota Denpasar	96.97%	33	32	1
9	Kab. Buleleng	94.12%	34	32	2
Total		98.14%	161	158	3

Sumber: <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> (diunduh tanggal 13-06-2019; 16:42)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SMA di Provinsi Bali sebanyak 161 sekolah. Sampai batas waktu pengambilan data pada laman Dapodik tersebut ada 158 sekolah yang sudah mengirimkan datanya, dan masih ada 3 sekolah

yang belum mengirimkan datanya. Masing-masing dari Kabupaten/Kota Denpasar 1 sekolah, dan Buleleng 2 sekolah. Sedangkan progres pengiriman data pada tingkat Nasional Bali ada pada urutan ke 18. Data jumlah sekolah ini menunjukkan banyaknya sekolah yang telah mengirimkan data Dapodik sampai batas waktu penutupan pengiriman data Dapodik. Data ini diberikan sebagai perbandingan jika dalam analisis data mutu, Tim Penjaminan Mutu pendidikan Daerah menemukan perbedaan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu pada standar yang berbeda. Misalnya pada standar Sarana Prasarana jumlah sekolah berbeda dengan pada standar kompetensi lulusan.

2. Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018

Untuk mengetahui jumlah sekolah yang sudah mengirimkan data PMP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018

No	Wilayah	%	Total Sekolah	Total Kirim	Total Sisa
1	<u>Kab. Jembrana</u>	100%	13	13	0
2	<u>Kab. Klungkung</u>	100%	11	11	0
3	<u>Kab. Tabanan</u>	100%	14	14	0
4	<u>Kab. Bangli</u>	100%	6	6	0
5	<u>Kab. Buleleng</u>	93.94%	33	31	2
6	<u>Kota Denpasar</u>	92.31%	26	24	2
7	<u>Kab. Gianyar</u>	91.67%	12	11	1
8	<u>Kab. Badung</u>	90%	20	18	2
9	<u>Kab. Karang Asem</u>	88.89%	18	16	2
Total		94.12%	153	144	9
<i>*Sekolah dengan bentuk pendidikan SLB dan SPK tidak dihitung.</i>					

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> (diunduh tanggal 13-06-2019; 16:42)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SMA di Provinsi Bali sebanyak 153 sekolah. Sampai batas waktu pengambilan data pada laman PMP tersebut ada 144 sekolah yang sudah mengirimkan datanya, dan masih ada 9 sekolah yang belum mengirimkan datanya. Masing-masing dari Kabupaten Buleleng 2 sekolah, Denpasar 2 sekolah, Gianyar 1 sekolah, Badung 2 Sekolah dan Karangasem 2. Sedangkan progres pengiriman data pada tingkat Nasional Bali ada pada urutan ke 22. Dengan melihat kedua Tabel yang telah dipaparkan terdapat perbedaan data pada Dapodik dan PMP. Dengan diketahuinya perbedaan data ini, maka dalam analisis capaian rapor mutu daerahnya tidak akan membingungkan lagi

3. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SMA Provinsi Bali

Perbedaan utama tampilan rapor mutu Tahun 2018 adalah adanya jumlah sekolah serta data sekolah yang telah mencapai level tertentu pada setiap standar. Pada tingkat

provinsi bahkan ketika angka yang menunjukkan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu di-klik akan muncul nama-nama sekolah tersebut. Dengan demikian daerah akan mudah melakukan intervensi terhadap sekolah tersebut pada masing-masing standar. Adapun respondennya sebagai berikut.

Gambar 3.1 Data Responden pada Rapor Mutu Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018

Jumlah Sekolah	:	148
Responden Pengawas	:	122
Responden Guru	:	1.552
Responden Siswa	:	5.491
Responden Komite	:	301

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berikut adalah capaian SNP pada jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018.

Tabel 3.3 Capaian SNP pada Level Tertentu pada Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018

No	Standar/Indikator/Sub	Capaian 2018		Kinerja	Sasaran				
		Nilai	Kategori		M1	M2	M3	M4	SNP
1.	Standar Kompetensi Lulusan	6,52	★★★★		1	0	0	90	57
2.	Standar Isi	5,51	★★★★		1	1	27	113	6
3.	Standar Proses	6,52	★★★★		0	2	1	92	53
4.	Standar Penilaian Pendidikan	6,22	★★★★		0	1	4	116	26
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,77	★★★		6	40	102	0	0
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4,52	★★★		0	16	118	14	0
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	5,91	★★★★		1	2	4	141	0
8.	Standar Pembiayaan	5,75	★★★★		0	4	22	121	1

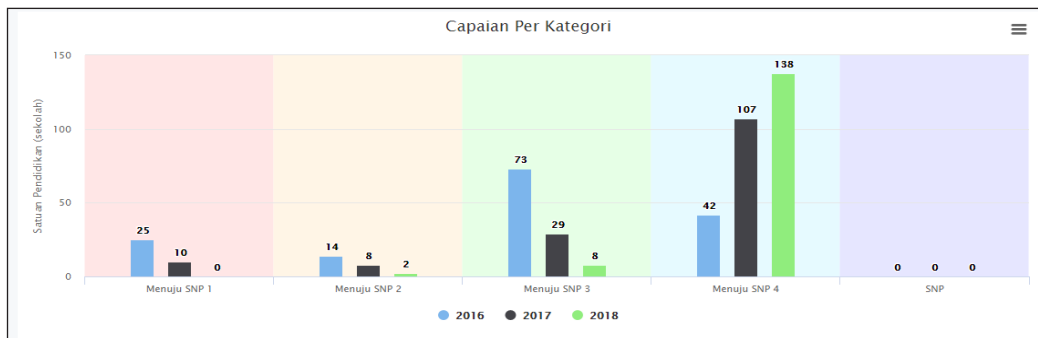
Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa kolom nilai adalah besarnya capaian nilai standar yang diperoleh yang didapat dari rata-rata nilai indikatornya. Sedangkan rata-rata nilai indikatornya didapat dari rata-rata sub indikatornya. Kolom katagori adalah level capaian masing-masing sekolah pada standar mulai bintang 1 sampai bintang 5, sesuai kriteria nilai yang sudah dibuatkan intervalnya. Kolom kinerja adalah capaian peningkatan/penurunan hasil SNP dari tahun sebelumnya. Dari tampilan garis pendek tersebut yang terlihat menurun adalah pada standar PTK dan standar sarpras. Kolom sasaran menunjukkan banyaknya sekolah yang berada pada level tertentu. Misalnya pada SKL dari 148 sekolah ada sebanyak 57 sekolah yang sudah mencapai SNP, 90 sekolah yang berada pada level menuju SNP 4, dan 1 sekolah berada pada level M1, serta tidak ada sekolah berada M2 dan M3. Selanjutnya dari

Tabel 3.3 didapat bahwa tidak ada sekolah mencapai SNP untuk Standar PTK, sarana dan prasarana dan pengelolaan.

Berdasarkan data responden yang mengisi data PMP, dapat diketahui ada satu sekolah yang belum muncul rapor mutunya, karena banyaknya sekolah yang mengirim data PMP sebanyak 153 sekolah sedangkan yang muncul sebanyak 148 sekolah. Adapun capaian dalam 3 tahun adalah berikut.

Gambar 3.2 Capaian Rapor Mutu Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan data pada Gambar 3.2 dapat dijelaskan bahwa banyaknya sekolah yang berada pada level menuju SNP 1 semakin berkurang. Pada Tahun 2016 ada 25 sekolah, pada Tahun 2017 ada 10 sekolah dan pada Tahun 2018 sudah tidak ada sekolah yang berada pada level ini. Ini menunjukkan bahwa sekolah semakin mampu dalam meningkatkan level standarnya. Begitu pula pada level menuju SNP 2 dan menuju SNP 3 semuanya mengalami penurunan jumlah. Sedangkan pada level menuju SNP 4, sudah pasti mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 ada 42 sekolah, pada Tahun 2017 meningkat menjadi 107 sekolah sedangkan pada Tahun 2018 meningkat menjadi sebanyak 138 sekolah.

Besarnya capaian SNP untuk masing-masing standar dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

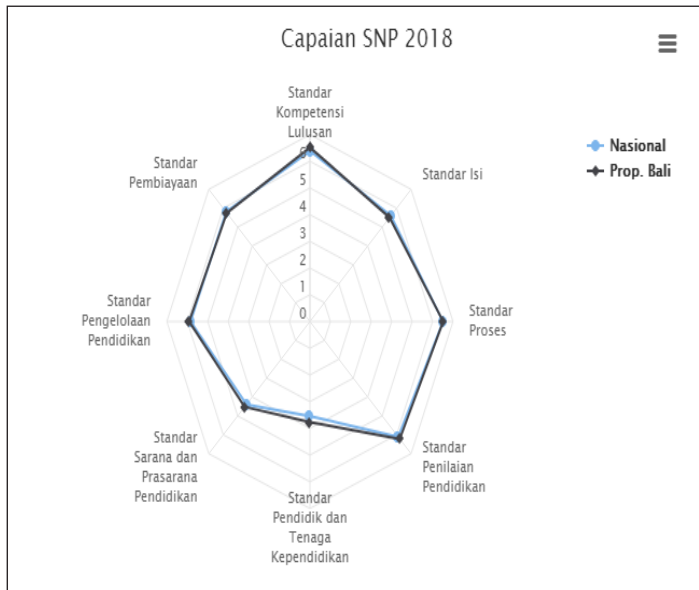
Tabel 3.4 Capaian SNP Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018

NO	SNP	2016	2017	2018
1	Standar Kompetensi Lulusan	5,82	5,57	6,52
2	Standar Isi	4,88	4,90	5,51
3	Standar Proses	5,11	5,92	6,52
4	Standar Penilaian Pendidikan	4,47	5,78	6,22
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,61	4,50	3,77
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4,67	4,18	4,52
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4,72	5,26	5,91
8	Standar Pembiayaan	4,10	5,17	5,75

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa capaian tiap standar hampir semuanya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya saja untuk standar pendidikan dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana yang mengalami sedikit penurunan. Untuk lebih mudah melihatnya dapat dilihat pada grafik jaring laba-laba berikut.

Gambar 3.3 Grafik Radar Capaian Mutu SNP Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Grafik radar menunjukkan bahwa pada standar PTK dan standar sarana-prasarana terjadi persilangan garis sedangkan pada standar yang lain tidak terjadi perpotongan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai mutu pada kedua standar tersebut. Untuk melihat penurunan dan penyebabnya akan dibahas dalam analisis setiap standar di bagian berikutnya.

B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan

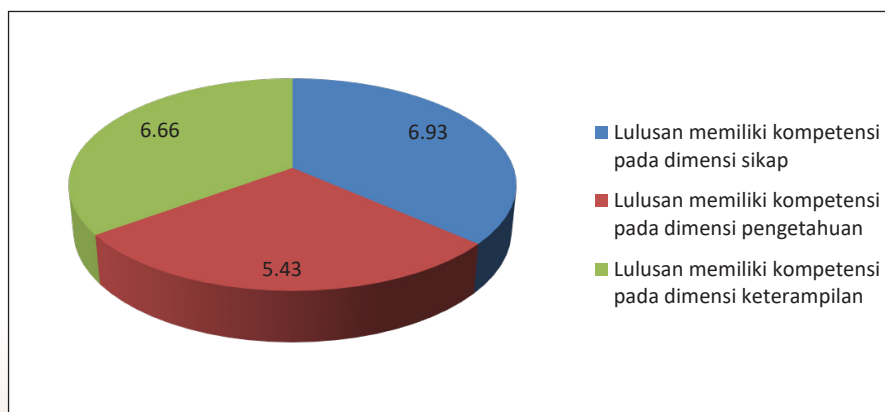
Setelah melihat gambaran umum capaian SNP pada semua standar Tahun 2018, berikutnya akan dianalisis masing-masing standar untuk mencari solusi pemecahan masalah dan memunculkan rekomendasi yang dijadikan program perencanaan pemenuhan mutu pada tahun berikutnya. Hasil pada capaian SKL sebagai berikut.

Tabel 3.5 Capaian SKL Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018

Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai
1	Standar Kompetensi Lulusan	6,52
1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6,93
1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME	6,95
1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berakhlak	6,98
1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin	6,95
1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun	6,97
1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur	6,9
1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli	6,94
1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri	6,88
1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab	6,97
1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat	6,75
1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	6,99
1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	5,43
1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	5,43
1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6,66
1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	6,48
1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	6,08
1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	6,77
1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	6,91
1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	6,96
1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif	6,73

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Gambar 3.4 Grafik capaian indikator SKL Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018



Besarnya capaian SKL pada rapor mutu Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-ratanya sebesar 6,52. Dari ketiga indikator SKL yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan nilai yang paling rendah adalah 5,43 pada pengetahuan. Indikator pengetahuan ini hanya memiliki satu sub indikator yaitu indikator 1.2.1 Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif. Dengan demikian penyebab rendahnya hanyalah dari sub indikator 1.2.1. Untuk mengetahui dari mana asal data tersebut, perlu ditelusuri asal data dengan membuka tabel konversi excel.

Pada tabel konversi excel ditemukan bahwa data 1.2.1 berasal dari data DAPO dan PMP. Data yang diinput melalui aplikasi dapodik adalah data:

1. Rata-rata nilai rapor siswa kelas 10, 11 dan 12 untuk setiap mata pelajaran
2. Rata-rata hasil US/USBN untuk 4 mapel yang diujikan
3. Tingkat kelulusan siswa kelas 12.

Data pada indikator 1.2.1 yang diperoleh dari pengisian instrumen PMP dapat dilihat pada perangkat instrumen PMP untuk jenjang SMA. Setelah dilakukan analisis atas pertanyaan dan kode sub indikator didapat bahwa pertanyaan untuk 1.2.1 adalah pertanyaan A7 (pada komponen A yaitu komponen hasil belajar dan nomor butir ke-7). Pertanyaan ini terdapat pada responden kepala sekolah dan pengawas. Adapun pertanyaannya sebagai berikut.

Petunjuk untuk nomor 7 - 9,

Arti angka 1 tidak ada; 2 1-5 penghargaan/tahun; 3 6-10 penghargaan/tahun; 4 >10 penghargaan/tahun

7. Prestasi siswa/kelompok di sekolah anda atas pengetahuan yang dimiliki

No	Tingkat	Frekuensi			
1	Tingkat Kabupaten	1	2	3	4
2	Tingkat Propinsi	1	2	3	4
3	Tingkat Nasional	1	2	3	4
4	Tingkat Internasional	1	2	3	4

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMA (2018: 7)

Dari 1 nomor pertanyaan akan dijawab 4 butir pertanyaan yang menanyakan prestasi siswa/kelompok atas pengetahuan yang dimiliki oleh sekolah. Sesuai kriteria jika mereka tidak mendapat penghargaan maka mereka pilih angka 1 baik pada tingkat kabupaten/provinsi/nasional/internasional, jika mendapat 1 sampai dengan 5 penghargaan mereka bisa pilih angka dan seterusnya. Sekolah hendaknya mengisi dengan memperhatikan bukti fisik yang ada. Adapun deskripsi dan bukti fisik yang harus diperhatikan pada sub indikator 1.2.1 ini dapat dilihat pada panduan teknis pengisian instrumen (halaman 99) sebagai berikut.

7. Sekolah menunjukkan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh kelompok/ individu siswa untuk mengukur tingkat pengetahuan yang dimiliki siswa sebagai hasil pengalaman pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah selama satu tahun terakhir.

Diisi mengacu pada:

- a) Piagam penghargaan dalam bentuk piala, plakat atau sertifikat yang dimiliki sekolah pada tahun berjalan.
- b) Diskusi dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah dan siswa.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMA (2018: 104)

Sekolah hendaknya mengisi butir pertanyaan ini dengan jujur untuk memudahkan mereka menentukan target keberhasilan pada program peningkatan berikutnya. Karena dari capaian pengetahuan yang diperoleh tahun ini akan digunakan untuk meningkatkan prestasi pada tahun-tahun berikutnya. Jika prestasi pengetahuan yang diinput sekarang

tidak benar maka perencanaan yang dibuat juga tidak akan sesuai. Setelah mencermati paket instrumen sesuai jenjang, langkah selanjutnya adalah mencermati buku indikator. Pada kode 1.2.1 akan dapat dilihat deskripsi sub indikator untuk siswa jenjang SMA serta penyebab tidak tercapainya standar mutu. Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu sebagai berikut.

1. Kualifikasi dan latar belakang pendidikan guru tidak selaras dengan mata pelajaran yang diampu.
2. Guru belum memiliki kompetensi yang sesuai standar dan tidak tersertifikasi sebagai pendidik.
3. Alokasi waktu dan beban belajar memberatkan pada sisi siswa.
4. Gaya dan metode pembelajaran yang diterapkan tidak mengarah pada bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.
5. Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana belum memadai, dan lainnya.

Dengan memperhatikan buku indikator mutu yaitu pada penyebab tidak tercapainya standar mutu dapat diketahui masalah dan akar masalah, sehingga akan mudah membuat rekomendasi dan program pada perencanaan mutu. Adapun pilihan rekomendasi yang dapat diajukan daerah sebagai berikut.

1. Perlu membuat program penyesuaian kualifikasi guru dengan mata pelajaran yang diampu.
2. Perlu diberikan pelatihan peningkatan kompetensi pada mata pelajaran yang diampu.
3. Perlu menerapkan pengaturan beban belajar antara tatap muka dan penugasan di sekolah, sehingga tidak memberatkan siswa.
4. Perlu diberikan pelatihan terkait dengan gaya dan metode pembelajaran yang mengarah pada pengembangan bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.
5. Perlu melengkapi sarana-prasarana pembelajaran yang lebih memadai.

C. Analisis Capaian Standar Isi

Analisis berikutnya adalah capaian pada standar isi. Seperti pada analisis SKL langkah yang dilakukan adalah mencermati rapor mutu pada standar isi, terutama capaian yang paling rendah karena akan menjadi prioritas penanganan. Setelah itu menelusuri asal data dengan membuka file tabel konversi, selanjutnya membuka paket instrumen dan pedoman teknisnya serta mencermati buku indikator mutu untuk membuat rekomendasi. Adapun capaian rapor mutu pada standar isi sebagai berikut.

Tabel 3.6 Capaian Standar Isi Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018

2 Standar Isi		5.51	****
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	4.79	***
2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap	5.07	****
2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	5.39	****
2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	5.33	****
2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	4.08	***
2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	4.08	***
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	5.96	****
2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum	5.35	****
2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	6.97	*****
2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan	5.07	****
2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan	6.43	****
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.78	****
2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku	6.99	*****
2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi	4.75	***
2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	4.64	***
2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa	6.74	*****

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 3 indikator pada standar isi, capaian yang paling rendah adalah indikator 2.1. Adapun penyebab rendahnya nilai indikator itu adalah capaian terendah dari sub indikatornya yaitu pada sub indikator 2.1.4 yaitu “Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa” dan sub indikator 2.1.5 “Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran”. Setelah ditelusuri datanya pada tabel konversi didapat bahwa terdapat 20 butir pertanyaan pada sub indikator 2.1.4 dan 2.1.5 yaitu pada pertanyaan B. Isi pendidikan pada butir nomor 7, yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun butir pertanyaannya sebagai berikut.

7. Kesesuaian tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi dalam mata pelajaran di sekolah anda
Petunjuk arti angka adalah 1 tidak ada; 2 < 50%; 3 antara 51-85%; 4 > 85%

No	Mata Pelajaran	Tingkat kompetensi				Ruang Lingkup Materi			
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1	2	3	4	1	2	3	4
3	Bahasa Indonesia	1	2	3	4	1	2	3	4
4	Matematika	1	2	3	4	1	2	3	4
5	Bahasa Inggris	1	2	3	4	1	2	3	4
6	Sejarah Indonesia	1	2	3	4	1	2	3	4
7	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	1	2	3	4	1	2	3	4
8	Matematika (Peminatan)	1	2	3	4	1	2	3	4
9	Biologi	1	2	3	4	1	2	3	4
10	Fisika	1	2	3	4	1	2	3	4
11	Kimia	1	2	3	4	1	2	3	4
12	Geografi	1	2	3	4	1	2	3	4
13	Sejarah	1	2	3	4	1	2	3	4
14	Sosiologi	1	2	3	4	1	2	3	4
15	Ekonomi	1	2	3	4	1	2	3	4
16	Bahasa dan Sastra Indonesia	1	2	3	4	1	2	3	4
17	Bahasa dan Sastra Inggris	1	2	3	4	1	2	3	4
18	Bahasa dan Sastra Asing Lainnya	1	2	3	4	1	2	3	4
19	Antropologi	1	2	3	4	1	2	3	4
20	Lintas Minat/Pendalaman Minat	1	2	3	4	1	2	3	4

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMA (2018: 12)

Berdasarkan kutipan dari instrumen dapat dijelaskan bahwa kesesuaian ruang lingkup materi untuk 20 mata pelajaran yang dipilih akan menentukan capaian hasil SNP nya. Untuk bisa menentukan apakah guru memperoleh skor 1, 2, 3 atau 4 maka bukti fisik mengacu pada kolom berikut.

7. Perangkat pembelajaran dikembangkan untuk semua mata pelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi pembelajaran. Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Diisi mengacu pada:

- Perangkat pembelajaran semua mata pelajaran.
- Buku yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran.
- Silabus dan RPP Guru mata pelajaran pada semua tingkat dan kelas.
- Telaah kesesuaian perangkat pembelajaran dengan tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMA (2018: 109)

Hal terpenting yang harus dilihat saat pengisian adalah bahwa guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu. Bukti fisiknya adalah bahwa silabus dan RPP guru mata pelajaran pada semua tingkat dan kelas. Jika guru memberi skor 4 berarti riilnya guru telah memiliki silabus dan RPP yang lengkap paling tidak di atas 85% dari semua RPP yang mereka harus buat. Misalnya ada 20 RPP untuk matematika, maka guru matematika tersebut minimal telah membuat 18 RPP yang sudah sesuai ruang lingkup materinya. Jika dari 18 RPP yang dibuat hanya 10 yang baru sesuai ruang lingkup materinya, maka guru tersebut harus memberi skor 3. Terlebih lagi jika guru tidak membuat RPP atau hanya membuat RPP hanya 2 buah, maka guru tersebut harus memberi skor pada butir tersebut 2. Langkah selanjutnya adalah mencermati indikator mutu pada butir 2.1.4. dan 2.1.5 Deskripsi dari sub indikator 2.1.5 sebagai berikut.

Deskripsi:

- ❖ Memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa.
- ❖ Menyesuaikan tingkat keingintahuan siswa baik itu pada tingkat dasar, teknis, spesifik, detil, dan/atau kompleks.
- ❖ Bidang kajian pembelajaran berdasarkan bakat dan minat siswa untuk memecahkan masalah meliputi bidang:
 - ilmu pengetahuan,
 - teknologi,
 - seni,
 - budaya, dan/atau
 - humaniora.
- ❖ Mencerminkan perilaku siswa sesuai dengan tahap perkembangannya.
- ❖ Menyesuaikan dengan perkembangan siswa pada jenjang SMA /SMK yaitu pada konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional.
- ❖ Menyesuaikan dengan yang dipelajari pada jenjang pendidikan dan sumber lain secara mandiri.
- ❖ Menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan.

Sumber: Indikator Mutu (2017: 19 -20)

Resiko jika standar mutu tersebut tidak dicapai sebagai berikut.

1. Perilaku siswa di bawah tahap perkembangan yang sesuai.
2. Siswa tidak bisa mengembangkan bakat dan minat sesuai keingintahuannya.
3. Keterampilan siswa tidak berkembang.
4. Materi pembelajaran sulit dicerna oleh siswa.
5. Lingkup pembelajaran yang diterima siswa tidak berkembang antar jenjang pendidikan.

Ketidaktercapaian standar mutu tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Kompetensi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran kurang.
2. Sekolah belum memperhatikan perkembangan psikologis anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan, fungsi sekolah dan lingkungan siswa.

Dari resiko dan penyebab tersebut dapat dibuat rekomendasi pemenuhan mutu sebagai prioritas sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran (misalnya pelatihan, pendampingan, supervisi, studi banding, belajar mandiri, lesson study, dan sebagainya).
2. Perlu membuat program pembelajaran dengan memperhatikan psikologis anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan serta fungsi dan lingkungan siswa.
3. Mengaktifkan MGMP mapel disekolah
4. Memberikan penguatan pada guru tentang pemahaman karakteristik siswa.
5. Memberikan penguatan kepada guru mengenai pemilihan materi ajar agar sesuai dengan ruang lingkup materi pembelajaran dan perkembangan psikologis siswa
6. Guru dalam memberikan tugas tersruktur dan tidak tersruktur harus sesuai materi pembelajaran dan tahap perkembangan anak.
7. Dalam menyampaikan materi pembelajaran , guru hendaknya menyesuaikan dengan perkembangan siswa yaitu pada konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional.
8. Memberi penguatan pada guru pentingnya mengembangkan materi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, lingkungan siswa.

D. Analisis Capaian Standar Proses

Berikut adalah capaian setiap sub indikator pada standar proses pada rapor mutu SMA Provinsi Bali Tahun 2018.

Tabel 3.7 Capaian Standar Proses Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018

3 Standar Proses		6.52
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.69
3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan	6.86
3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi	6.89
3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis	6.65
3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	6.36
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.67
3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan	6.8
3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran	6.63
3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu	6.74
3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah	6.71
3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi	6.79
3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu	6.78
3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;	6.69

3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif	6.67
3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat	6.86
3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	6.83
3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.	6.76
3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa	6.34
3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	6.14
3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar	6.54
3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran	6.8
3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6.21
3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif	5.66
3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik	6.5
3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran	6.53
3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru	5.87
3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran	6.21
3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran	6.5

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Permasalahan pertama yang ditemukan pada standar proses adalah pada indikator 3.1.3 dengan nilai capaian 6,65 (95%) dimana pada menurut pemantauan pada supervisi tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya di sekolah. Hal ini dapat diminimalisir dengan memperhatikan panduan pengisian pemetaan mutu yang menjadi dasar untuk menentukan capaian yang sesuai dengan SNP.

Pengetahuan guru dalam menyusun dokumen rencana yang lengkap dan sistematis perlu ditingkatkan dengan cara memberikan pendampingan terhadap guru dalam menyusun dokumen yang mengacu pada Permendikbud No 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan.

Permasalahan kedua ditemukan pada sub indikator 3.1.4 yaitu Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah dengan nilai capaian 6.36 (91%). Nilai dari capaian tersebut merupakan nilai capaian terkecil dari indikator 3.1 Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan. RPP seharusnya dievaluasi terlebih dahulu oleh Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah sehingga RPP tersebut layak dijadikan rancangan yang tepat dalam penerapan proses pembelajaran.

Jika RPP yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil evaluasi dari Kepala Sekolah dan Pengawas, maka kegiatan pembelajaran tidak akan tercapai sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran sebagaimana termuat di dalam Permendikbud No 22 Tahun 2016 tentang standar proses.

Untuk mengatasi permasalahan diatas maka sekolah diharapkan membuat program peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan RPP yang baik dan benar sesuai dengan pedoman yang ada. Serta dilaksanakan proses monitoring dan evaluasi oleh Kepala Sekolah dan Pengawas secara berkelanjutan melalui pendampingan dan pembimbingan.

Permasalahan berikutnya dari 3 indikator yang terdapat dalam standar proses, capaian pada indikator 3.3 yang paling rendah. Dari 6 sub indikatornya ada capaian terendah yaitu 3.3.1 dengan nilai 5,66 (81%). Data sub indikator 3.3.1 didapat dari 3

butir pertanyaan pada instrumen komponen C (proses pendidikan) nomor butir 14 yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Butir pertanyaan sebagai berikut.

14. Aspek dan perangkat penilaian otentik yang digunakan guru di sekolah anda

No	Aspek	Angket	Observasi	Catatan Anekdote	Refleksi
1	Kesiapan siswa	☐	☐	☐	☐
2	Proses belajar	☐	☐	☐	☐
3	Hasil belajar	☐	☐	☐	☐

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMA (2018: 108)

Pertanyaan ini bertujuan untuk menanyakan apakah guru dalam proses pembelajaran melakukan penilaian terhadap siswa baik pada kesiapan belajarnya (sebelum pembelajaran), proses belajar (selama pembelajaran) dan hasil belajar (setelah pembelajaran). Jika guru melakukan ketiga hal tersebut, berarti guru sudah melaksanakan penilaian secara otentik. Guru dapat memilih jenis penilaian yang digunakan. Untuk melihat bukti fisik yang diacu, dapat melihat pedoman teknis pengisian instrumen sesuai nomor butir pertanyaannya, seperti berikut ini.

14. Penilaian otentik menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap. Guru dalam proses pembelajaran melakukan penilaian otentik secara komprehensif, baik di kelas, bengkel kerja, laboratorium, maupun tempat praktik kerja, dengan menggunakan: angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen instrumen penilaian otentik,
- b) Observasi pelaksanaan penilaian otentik,
- c) Hasil penilaian otentik;
- d) Diskusi dengan guru

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMA (2018: 108)

Penilaian otentik ini muncul pada standar proses. Hal ini bisa dijelaskan bahwa sesuai pedoman teknis di atas bahwa keterpaduan kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara utuh akan menggambarkan kapasitas, gaya dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan sikap. Jadi dengan melakukan penilaian otentik secara komprehensif akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah/pengawas/guru dapat menentukan jawaban dari

bukti fisik yang mereka miliki seperti dokumen instrumen penilaian otentik, observasi pelaksanaan otentik, hasil penilaian dan diskusi dengan guru. Ketidak tercapaian standar mutu pada sub indikator 3.3.1. akan berdampak pada hal-hal sebagai berikut.

1. Guru kesulitan dalam memperbaiki proses pembelajaran.
2. Siswa tidak memiliki dorongan untuk mencapai aspek pengetahuan dan keterampilan.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah guru belum memahami prosedur penilaian otentik dengan baik serta instrument penilaian yang terlalu banyak menyebabkan resiko standar mutu tidak tercapai. Rekomendasi dari permasalahan tersebut sebagai berikut.

1. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam memahami penilaian otentik dengan baik.
2. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengidentifikasi instrumen penilaian sehingga dapat memilih dan mengembangkan instrumen penilaian otentik.

E. Analisis Capaian Standar Penilaian

Berikut adalah analisis capaian standar penilaian pada rapor mutu jenjang SMA Provinsi Bali.

Tabel 3.8 Capaian Standar Penilaian Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018

4 Standar Penilaian Pendidikan		6,27
4.1. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi		6,66
4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan	6,71
4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah	6,61
4.2. Teknik penilaian obyektif dan akuntabel		6,21
4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel	6,44
4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap	5,98
4.3. Penilaian pendidikan ditindaklanjuti		6,67
4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	6,74
4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik	6,6
4.4. Instrumen penilaian menyesuaikan aspek		6,1
4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap	6,12
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan	6,23
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan	5,95
4.5. Penilaian dilakukan mengikuti prosedur		5,69
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur	6,66
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur	6,52
4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai	3,88

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 5 indikator pada standar penilaian ini yang memiliki nilai terendah adalah pada indikator ke-5 dan nilai terendah sub indikatornya adalah 4.5.3. Hasil penelusuran data pada sub indikator 4.5.3 diperoleh informasi bahwa terdapat 40 butir pertanyaan dari perangkat instrumen PMP yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun pertanyaannya sebagai berikut.

12. Pertimbangan cara hitung penilaian pendidikan di sekolah anda.

No	Mata Pelajaran	Penilaian Hasil Belajar					Kelulusan					
		Ulangan	Pengamatan	Penugasan	Penilaian Lain	Total	Ujian Sekolah	Penilaian Sikap	Penilaian Pengetahuan	Penilaian Keterampilan	Total	
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%	
3	Bahasa Indonesia	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%	
4	Matematika	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%	
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%	
7	Bahasa Inggris	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%	
8	Seni Budaya	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%	
9	Prakarya	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%	
10	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%	

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMA (2018: 108)

Pertanyaan untuk sub indikator 4.5.3 adalah terletak pada pernyataan yang diberi kotak yaitu pada komponen kelulusan. Pada komponen tersebut ada 4 kolom yang isinya masing-masing adalah ujian sekolah, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sedangkan jumlah mata pelajaran ada 10, sehingga banyaknya isian sebanyak 4×10 yaitu 40 butir pertanyaan. Persentase yang diisi pada kolom komponen tersebut harus berjumlah 100% sesuai nilai yang sudah ditulis pada total. Guru hanya mengisi sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampu. Untuk menentukan cara menjawab dari responden dapat dilihat pada pedoman teknis instrumen sebagai berikut.

12. Guru mempertimbangkan penilaian hasil belajar siswa dalam bentuk:

- Ulangan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Siswa.
- Pengamatan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indra, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator hasil belajar yang diamati.
- Penugasan dengan memberikan tugas yang dikerjakan siswa secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.
- Bentuk penilaian lain dapat berupa jurnal, portofolio, dan penilaian proyek.

Sekolah mempertimbangkan penentuan kelulusan siswa berdasarkan:

- Ujian sekolah.
- Penilaian sikap.
- Penilaian pengetahuan.
- Penilaian keterampilan.

Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, pengamatan, penugasan dan bentuk lain.
- b) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, UAS, UUK, UKK.
- c) Diskusi dengan guru dan siswa.
- d) Pedoman ketentuan kelulusan.
- e) Notulen rapat penentuan kelulusan.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMA (2018: 108)

Setelah memahami dari mana asal data tersebut, langkah selanjutnya mencermati indikator mutu untuk melihat resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut, agar nanti dapat dibuatkan rekomendasinya. Adapun pernyataannya sebagai berikut.

Sub-Indikator 3. Kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai

Deskripsi:

- ❖ Kenalkan kelas dan kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik.
- ❖ Pertimbangan penentuan kelulusan siswa:
 - Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - Ujian sekolah.
 - Ujian sekolah berstandar nasional.
 - Penilaian sikap.
 - Penilaian pengetahuan.
 - Penilaian keterampilan.

Resiko Jika Standar Mutu Tidak Tercapai:

- ❖ Pengukuran pencapaian kompetensi siswa tidak dapat diketahui dengan tepat.
- ❖ Ketidakadilan bagi siswa yang berkebutuhan khusus dan memiliki perbedaan latar belakang.

Penyebab Tidak Tercapainya Standar Mutu:

- ❖ Sering terjadinya perubahan peraturan yang berkaitan dengan penilaian.

Resiko jika standar mutu tersebut tidak tercapai adalah:

1. Pengukuran pencapaian kompetensi siswa tidak dapat diketahui dengan tepat.
2. Ketidakadilan bagi siswa yang berkebutuhan khusus dan memiliki perbedaan latar belakang.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah karena sering terjadinya perubahan peraturan yang berkaitan dengan penilaian.

Dengan mencermati penyebab tidak tercapainya standar mutu pada sub indikator 4.5.3, maka rekomendasi yang dapat dibuat sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan sosialisasi terkait peraturan yang terbaru secara rutin dengan program sistematis dan terencana.
2. Perlu mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan penilaian termasuk penentuan kelulusan siswa.

F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 3.9 Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2018	
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		3,77	***
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	3,65	**
5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	5,72	****
5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran	0	*
5.1.4.	Bersertifikat pendidik	5,54	****
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik	5,13	****
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		*
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik	5,64	****
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik	0	*
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5,71	****
5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	6,38	****
5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	6,47	****
5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan	6,1	****
5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara	4,68	***
5.2.5.	Bersertifikat pendidik	5,06	****
5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah	4,3	***
5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	3,4	**
5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik	3,8	***
5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik	3,65	**
5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik	2,6	**
5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	3,57	**
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	2,03	**
5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi	0	*
5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat	0	*
5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat		*
5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	6,38	****
5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan	4,9	***
5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		*
5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik		*
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik		*
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik		*

5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0,86	★
5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium	0	★
5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai	4,35	★★★
5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat		★
5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai	2,36	★★
5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran	0	★
5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan		★
5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran	0,94	★
5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan		★
5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★
5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik		★
5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik		★
5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik		★
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	1,92	★
5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan	5,01	★★★
5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai	4,02	★★★
5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat		★
5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai	2,27	★★
5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan	0	★
5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan	1,56	★
5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik		★
5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik		★
5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik		★
5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★
5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik		★
5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik		★

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Standar pendidik dan tenaga kependidikan ini memiliki 5 indikator yaitu ketersediaan dan kompetensi dari guru, kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, laboran dan pustakawan. Pada perangkat instrumen tidak ada butir pertanyaan pada standar PTK ini, karena capaian nilainya berasal dari input data dapodik. Selain itu kompetensi guru dan kepala sekolah berasal dari nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) Tahun 2015. Berdasarkan capaian hasil dalam Tabel 3.9 dapat dijelaskan hampir semua nilai tenaga kependidikannya (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) rendah, terutama pada ketersediaannya. Karena tidak tersedia maka sudah pasti untuk kompetensi masing-masing akan kosong. Tetapi walaupun tenaga kependidikan (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) di sekolahnya ada, kompetensi ini juga masih tidak ada nilainya (na/0) karena memang datanya belum tersedia.

Pada ketersediaan dan kompetensi guru akan dibahas masing-masing sub indikator. Pada sub 5.1.5 yaitu guru yang berkompetensi pedagogik minimal baik nilainya 5,13. Jika nilai ini dikonversi ke skala 100, besarnya adalah $5,13/7 \times 100 = 73$. Ini berarti masih ada 27% guru yang kompetensi pedagogik belum baik meskipun secara aturan tahun ini harusnya sudah mencapai 100%.

Dengan mencermati indikator mutu, capaian sub indikator 5.1.5 yang belum mencapai standar akan berdampak pada kedalaman substansi materi pembelajaran yang diberikan guru kurang maksimal. Beberapa penyebab indikator ini belum tercapai

sebagai berikut.

1. Kurangnya pemahaman tentang kompetensi pedagogik
2. Paradigma guru dalam pengembangan belum berkembang
3. Proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Dengan demikian beberapa rekomendasi yang dapat dibuat daerah adalah:

1. Perlu terus mensosialisasikan dan memotivasi guru untuk meningkatkan pemahaman tentang kompetensi pedagogik.
2. Perlu memberikan ketegasan kepada penyelenggara pendidikan melalui kepala sekolah agar menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaiknya sesuai peran guru sebagai agen pembelajaran.
3. Perlu adanya pelatihan kompetensi pedagogik dari dinas Pendidikan atau direktorat pusat.

Sub indikator 5.2.10 yaitu ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah berkompetensi supervisi minimal baik besaran capaiannya adalah 2,6. Nilai ini jika dikonversi ke dalam skala 100 besarnya $2,6/7 \times 100 = 37\%$. Ini berarti masih ada sekitar 63% kepala sekolah belum memiliki kompetensi supervisi minimal baik. Adapun resiko jika standar mutu pada kompetensi supervisi belum tercapai mengurangi efektifitas pengelolaan pendidikan

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah:

1. Kurangnya pemahaman Kepala Sekolah tentang kompetensi supervisi
2. Paradigma Kepala Sekolah dalam pengembangan belum terbentuk
3. Tugas Kepala Sekolah terhadap kompetensi supervisi akademik maupun manajerial yang harusnya dilakukan oleh kepala sekolah sering tidak terlaksana, sehingga kerap kali diserahkan kepada wakil kepala sekolah

Berdasarkan penyebab tersebut daerah dapat membuat rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman kepala sekolah tentang kompetensi supervisi.
2. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran dan paradigma kepala sekolah dalam pengembangan kompetensi supervisi.
3. Perlu meningkatkan peran pengawasan dan pembinaan dari pengawas serta hasil supervisi dapat ditindak lanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Sub indikator 5.3.5. Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan dengan besaran capaian 4,9. Nilai ini jika dikonversikan ke dalam skala 100 besarnya $4,9/7 \times 100 = 70\%$, ini berarti masih ada sekitar 30% tenaga pelaksana urusan administrasi belum sesuai dengan ketentuan. Hal ini disebabkan karena Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi belum berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat.

Resiko jika standar mutu ini tidak tercapai antara lain :

1. Layanan pendukung penyelenggaraan pendidikan terkendala.
2. Beban kepala sekolah dan pendidik ditambah dengan urusan administrasi.

3. Urusan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, kesiswaan, kurikulum dan layanan khusus kurang sesuai harapan.

Berdasarkan penyebab di atas, rekomendasinya sebagai berikut.

1. Pemerintah pusat memberikan biaya pendidikan untuk Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi agar dapat meningkatkan kompetensinya
2. Kepala sekolah memperhatikan kompetensi Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi

Pada indikator ketersediaan dan kompetensi laboran, hampir sama dengan indikator tenaga administrasi sekolah, bahwa sekolah wajib memiliki kepala tenaga laboran, teknisi laboran dan tenaga laboran sesuai ketentuan. Capaian sub indikator 5.4.7 adalah 0,94 atau dapat dijelaskan bahwa hanya 13% SMA di Provinsi di Bali yang mempunyai tenaga laboran. Hal ini disebabkan karena sekolah jarang memiliki tenaga laboran.

Reziko jika standar mutu ini tidak tercapai antara lain :

1. Laboratorium tidak akan diberayakan secara maksimal.
2. Alat dan bahan-bahan praktekum tidak akan terdata secara procedural.
3. Kegiatan praktikum kurang berjalan lancar banyak yang tidak tercatat.

Berdasarkan penyebab di atas, rekomendasinya sebagai berikut.

1. Pemerintah pusat memprogramkan Diklat tenaga laboran atau mengangkat tenaga laboran yang baru.
2. Memberikan biaya pendidikan untuk Tenaga laboran agar dapat meningkatkan kompetensinya
3. Kepala sekolah membuat usulan tenaga laboran atau meningkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan.

Indikator terakhir 5.5.6 yaitu Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan dengan besaran capaian 1,56. Nilai ini jika dikonversikan ke dalam skala 100 besarnya $1,56/7 \times 100 = 22\%$, ini berarti masih ada sekitar 78% Tenaga Pustakawan berpendidikan belum sesuai dengan ketentuan. Hal ini disebabkan karena Tenaga Pustakawan belum berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat.

Reziko jika standar mutu ini tidak tercapai antara lain :

1. Ruang dan koleksi perpustakaan kurang terawat
2. Pemanfaatan perpustakaan kurang berkembang

Berdasarkan penyebab di atas, rekomendasinya sebagai berikut.

1. Pemerintah pusat memberikan biaya pendidikan untuk Tenaga Pustakawan agar dapat meningkatkan kompetensinya
2. Kepala sekolah memperhatikan kompetensi Tenaga Pustakawan

G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana

Analisis pada standar sarana prasarana ini sebenarnya sangat banyak, karena nilai rata-rata capaian standarnya sangat rendah yaitu 4,52, sebagai akibat nilai indikator dan sub indikatornya banyak yang rendah. Tetapi pada standar sarpras ini yang akan

dianalisis adalah sub indikator 6.2.16 yaitu kondisi laboratorium kimia layak pakai .

Tabel 3.10 Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018

6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan		4.52	« « «
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4.71	« « «
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai		«
6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	5.94	« « « «
6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan	6.94	« « « « «
6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa	3.09	« «
6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan	6.42	« « « «
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan	5.42	« « « «
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	3.23	« «
6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar	5.51	« « « «
6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar	3.03	« «
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar	0.08	«
6.2.5.	Memiliki laboratorium biologi sesuai standar	2.81	« «
6.2.6.	Memiliki laboratorium fisika sesuai standar	2.43	« «
6.2.7.	Memiliki laboratorium kimia sesuai standar	2.01	« «
6.2.8.	Memiliki laboratorium komputer sesuai standar	3.21	« «
6.2.9.	Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar	1.63	«
6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai	5.85	« « « «
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai	2.83	« «
6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai	6.95	« « « « «
6.2.14.	Kondisi laboratorium biologi layak pakai	1.98	«
6.2.15.	Kondisi laboratorium fisika layak pakai	1.96	«
6.2.16.	Kondisi laboratorium kimia layak pakai	0	«
6.2.17.	Kondisi laboratorium komputer layak pakai	1.95	«
6.2.18.	Kondisi laboratorium bahasa layak pakai	1.38	«
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	4.27	« « «
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar	5.21	« « « «
6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar	3.22	« «
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar	3.15	« «
6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar	1.98	«
6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar	4.76	« « «
6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar	1.94	«
6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar		«
6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar	3.54	« «
6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar	5.01	« « « «
6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar	2.36	« «
6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak	6.74	« « « « «
6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai	6.48	« « « «
6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai	3.68	« «
6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai	2.74	« «
6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai	3.02	« «
6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai	0.94	«
6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar	3.82	« « «
6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai		«
6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai	6.72	« « « « «
6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai	2.29	« «
6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai	0.01	«
6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai	1.37	«

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Diambilnya sub indikator 6.2.16 yaitu kondisi laboratorium kimia layak pakai adalah karena sub indikator ini merupakan salah satu indikator pendidikan dalam profil pendidikan daerah yang dikembangkan dari misi Kemdikbud yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermutu pada butir indikator pendidikan nomor 15 yaitu prosentase laboratorium baik. Setelah dicek pada tabel konversi excel didapat bahwa data ini berasal dari 5 butir pertanyaan dapodik yaitu daya tampung, rasio minimum luas / siswa, luas minimum termasuk ruang penyimpanan dan persiapan, lebar minimum dan sarana ruang laboratorium kimia. Adapun deskripsi dari sub indikator ini sebagai berikut. Besarnya capaian pada rapor mutu adalah 0, ini berarti SMA di Provinsi Bali belum memiliki ruang laboratorium kimia dalam kondisi yang layak pakai. Rekomendasinya adalah: melakukan identifikasi terhadap kelengkapan peralatan dan bahan-bahan praktik dan diinput pada Dapodik.

H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan memiliki 4 indikator, di antara 4 indikator ini, capaian nilai yang terendah adalah pada indikator ke-2. Rendahnya nilai program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan oleh sub indikator yang terendah yaitu pada sub indikator 7.2.1 yaitu memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap.

Tabel 3.11 Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2018	
Nomor	Standar/Indikator/Subindikator	Nilai	Kategori
1	Standar Kompetensi Lulusan	6,52	****
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	5,91	****
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6,51	****
7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	6,76	****
7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan	6,55	****
7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah	6,23	****
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6,33	****
7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	6,09	****
7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	6,69	****
7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan	6,24	****
7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	6,55	****
7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	6,36	****
7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	6,03	****
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2,07	**
7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik		*
7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan	5,91	****
7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik	0	*
7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik	6,55	****
7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan	0	*
7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik	0	*
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6,17	****
7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	6,17	****

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Setelah ditelusuri pada tabel konversi excel, data ini didapat dari 2 butir pertanyaan pada instrumen PMP. Adapun bentuk pertanyaan sebagai berikut.

16. Program penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh sekolah anda

- ☐ Promosi jabatan atau tugas
- ☐ Penguatan kompetensi dan kinerja
- ☐ Beasiswa melanjutkan pendidikan
- ☐ Insentif bonus atau kenaikan kerja
- ☐ Liburan atau istirahat kerja
- ☐ Piagam penghargaan
- ☐ Penghargaan informal (pujian, senyum, makan bersama dan lainnya)
- ☐ Bentuk hadiah lainnya

15. Pelatihan dan pengembangan yang sering diikuti oleh pendidik dan tenaga kependidikan sekolah anda. Petunjuk arti angka adalah 1 tidak pernah; 2 jarang; 3 sering; 4 selalu

No	Aktifitas	Frekuensi			
1	Penyusunan KTSP	1	2	3	4
2	Penyusunan Rencana Program Pembelajaran	1	2	3	4
3	Pengelolaan Kelas	1	2	3	4
4	Penilaian Pendidikan	1	2	3	4
5	Keteladanan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan	1	2	3	4
6	Kepemimpinan di kelas	1	2	3	4
7	Kewirausahaan	1	2	3	4
8	Membangun sekolah aman	1	2	3	4
9	Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan	1	2	3	4
10	Supervisi	1	2	3	4
11	Manajerial	1	2	3	4

Butir pertanyaan tersebut terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Untuk dapat menjawab dengan baik, dapat mencermati pada pedoman pengisiannya.

16. Program penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh sekolah berdasarkan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi:

- Kesesuaian penugasan dengan latar belakang pendidikan.
- Keseimbangan beban kerja.
- Keaktifan dalam pelaksanaan tugas.
- Pencapaian prestasi.
- Keikutsertaan dalam berbagai lomba.

Diisi mengacu pada:

- a) Penugasan dari kepala sekolah.
- b) Presensi (daftar hadir) pendidik dan tenaga kependidikan.
- c) Piagam, sertifikat, dan penghargaan lainnya.
- d) Hasil penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
- e) Diskusi dengan pendidik dan tenaga kependidikan

15. Sekolah menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.

- disusun dengan memperhatikan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah, termasuk pengembangan profesi bagi setiap pendidik dan tenaga kependidikan serta menerapkannya secara profesional, adil, dan terbuka.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen pelaksanaan dan hasil program pendayagunaan guru dan tenaga kependidikan.
- b) Diskusi dengan guru dan tenaga kependidikan.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMA (2018: 128)

Bisa jadi kepala sekolah yang menjawab pertanyaan ini akan mencenteng semua pilihan, tetapi jika pertanyaan ini diberikan kepada pengawas atau guru, belum tentu mereka mencenteng semua. Contoh pada guru, secara riil mereka akan mencenteng hanya pada kolom yang mereka alami saja. Dengan mengetahui kondisi yang seharusnya inilah kedepannya kepala sekolah perlu menerapkan pemberian penghargaan kepada guru dalam bentuk-bentuk seperti yang tertera pada butir pertanyaan 16.

Kepala sekolah memiliki jiwa kepemimpinan artinya dapat membangun tujuan bersama di sekolah, melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah serta penyelenggara sekolah; menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan komite sekolah; menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat. Adapun resiko jika standar mutu ini tidak tercapai adalah pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan sekolah akan terhambat. Secara umum penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah karena kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah belum memenuhi. Dengan demikian rekomendasi yang diberikan sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah
2. Sekolah perlu memprogramkan dalam RKAS kegiatan diklat atau workshop terkait dengan program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.

I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan

Butir pertanyaan untuk standar pembiayaan tidak ada secara khusus pada perangkat instrumen PMP. Tetapi ada 5 butir pertanyaan untuk pembiayaan yang dimasukkan ke dalam standar pengelolaan yaitu untuk sub indikator: 8.2.1; 8.3.2 dan 8.3.3.

Tabel 3.12 Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SMA Provinsi Bali Tahun 2018

8.	Standar Pembiayaan	5,75
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6,25
8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	5,95
8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	5,95
8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	6,85
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6,77
8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	6,77
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4,22
8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya	0,14
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	6,30
8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	6,21

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan hasil pada Tabel 3.11 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 3 indikator pada standar pembiayaan yang paling rendah adalah indikator 8.3 terutama pada sub indikator 8.3.1. Karena 8.3.1 bersumber dari data dapodik, maka analisis berikutnya diteruskan pada sub indikator terendah berikutnya yaitu 8.3.3. Pada indikator 8.3.1 capaiannya hanya 0,14 (2,03) ini berarti hanya 2,03% SMA di Provinsi Bali yang telah mendapatkan bantuan dana pemerintah, sedangkan yang lainnya belum.

Untuk sub indikator 8.3.1 capaiannya 0,14, ini masih tergolong pada level menuju SNP 1, setelah dianalisis hasil roport mutu ternyata hanya terdapat tiga sekolah yang menginput data pada alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya. Data ini bersumber dari Dapodik. Ketiga sekolah tersebut yaitu SMA Satu Atap Tejakula, SMA 4 Denpasar, SMAS Darma Praja Denpasar, hal ini dapat di simpulkan bahwa operator dalam menginput alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya belum berdasarkan data keuangan yang sebenarnya

Pada sub indikator 8.3.3 yaitu memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan, dapat dijelaskan bahwa data tersebut berasal dari dapodik. Setelah dicek pada butir instrumen, pertanyaannya sebagai berikut.

6. Pedoman yang dimiliki dan disosialisasikan oleh sekolah anda

No	Pedoman Sekolah	Ketersediaan	Sosialisasi				
			Guru	Tendik	Siswa	Orang Tua	Komite
1	kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);	☐ Ada ☐ Tidak	☐	☐	☐	☐	☐
2	kalender pendidikan/akademik;	☐ Ada ☐ Tidak	☐	☐	☐	☐	☐
3	struktur organisasi sekolah/madrasah;	☐ Ada ☐ Tidak	☐	☐	☐	☐	☐
4	pembagian tugas di antara guru;	☐ Ada ☐ Tidak	☐	☐	☐	☐	☐
5	pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;	☐ Ada ☐ Tidak	☐	☐	☐	☐	☐
6	peraturan akademik;	☐ Ada ☐ Tidak	☐	☐	☐	☐	☐
7	tata tertib sekolah/madrasah;	☐ Ada ☐ Tidak	☐	☐	☐	☐	☐
8	kode etik sekolah/madrasah;	☐ Ada ☐ Tidak	☐	☐	☐	☐	☐
9	biaya operasional sekolah/madrasah	☐ Ada ☐ Tidak	☐	☐	☐	☐	☐
10	pedoman sekolah aman	☐ Ada ☐ Tidak	☐	☐	☐	☐	☐
11	pedoman sekolah sehat (UKS)	☐ Ada ☐ Tidak	☐	☐	☐	☐	☐

Pada nomor 6 komponen pengelolaan yaitu butir nomor 9 ditanyakan apakah sekolah melaksanakan sosialisasi biaya operasional kepada pemangku kepentingan. Adapun pemangku kepentingan yang dimaksud adalah guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua siswa dan komite. Laporan dapat diakses oleh pemangku kepentingan melalui: media internet seperti website atau email, majalah sekolah, surat edaran, rapat komite dan lainnya. Untuk dapat memberikan jawaban yang benar dan sesuai maka acuannya adalah pedoman teknisnya sesuai butir tersebut yaitu sebagai berikut.

6. Sekolah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. Pedoman pengelolaan sekolah meliputi:

- kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
- kalender pendidikan/akademik;
- struktur organisasi sekolah;
- pembagian tugas di antara guru;
- pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
- peraturan akademik;
- tata tertib sekolah;
- kode etik sekolah;
- biaya operasional sekolah.

Pedoman disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah untuk menjamin tercapainya pengelolaan secara transparan dan akuntabel.

Diisi mengacu pada:

- a) Pedoman pengelolaan yang ditetapkan sekolah.
- b) Diskusi dengan warga sekolah, komite sekolah, dan pihak-pihak pemangku kepentingan.

Belum tercapainya sub indikator tersebut secara optimal akan berdampak pada hal-hal berikut.

1. Rentan terhadap tuduhan tindak pidana KKN kepada bendahara dan kepala sekolah oleh pemangku kepentingan.
2. Proses pemantauan, supervisi, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan akan sulit dilakukan.
3. Sekolah terkendala dalam membangun kemitraan dengan lembaga lain.

Belum tercapainya sub indikator tersebut secara optimal kemungkinan disebabkan oleh sistem informasi manajemen tidak terkelola dengan baik, kepala sekolah tidak mampu menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik serta hubungan antara sekolah dan pemangku kepentingan tidak harmonis.

Berdasarkan penyebab tersebut dapat diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu penyiapan data keuangan yang lengkap baik itu ditinjau dari jumlah, jenis sumber penerimaan, waktu penerimaan
2. Perlu pendampingan oleh kepala sekolah dan bendahara penerimaan pada operator saat menginput alokasi sumber dana.
3. Perlu penambahan pemahaman bagi operator dalam memahami Tab ribbon block Grant pada menu sekolah di Aplikasi Dapodik

J. Permasalahan dalam Penyusunan Peta Mutu Pendidikan

Beberapa permasalahan dalam penyusunan peta mutu pendidikan serta solusinya dapat diidentifikasi sebagai berikut.

Tabel 3.13 Permasalahan dan Solusi dalam Pengisian Instrumen PMP

No	Komponen	Permasalahan	Solusi
1.	Sistem pemetaan	Pertanyaan dalam instrumen tidak reliable (persepsi)	1. Penyamaan pemahaman/persepsi terhadap setiap item perangkat PMP pada seluruh responden 2. Memberikan rubrik setiap item perangkat PMP yang masih
		Error dalam proses dokumentasi dalam aplikasi dimensi sikap	1. Lakukan back-up data 2. Lakukan input data sesuai ketentuan
		Desain responden yang salah	1. Menunjuk responden sesuai tagihan perangkat PMP 2. Pastikan setiap responden melakukan pengisian data.

No	Komponen	Permasalahan	Solusi
2.	Petugas pemetaan	1. Tidak memberikan penjelasan mekanisme pengumpulan data 2. Tidak mendampingi proses pengisian 3. Tidak melakukan validasi terhadap hasil pengumpulan data	Pengawas sekolah memberikan penjelasan mekanisme pengumpulan data pada sekolah binaannya Pengawas sekolah wajib mendampingi operator dan responden untuk input data mutu Kepala sekolah dan Pengawas sekolah wajib melakukan validasi instrument data mutu sebelum di-entry
3.	Responden	Diisi berdasarkan persepsi dan bukan observasi Pengisian dilakukan oleh orang lain Proses dokumentasi dari isian manual ke dalam aplikasi tidak akurat	1. Mewajibkan responden mengisi data sesuai kondisi riil 2. Kepala sekolah dan pengawas sekolah melakukan verifikasi terhadap data isian perangkat PMP 1. Mewajibkan responden yang ditunjuk mengisi instrumen data mutu PMP 2. Memberikan waktu yang memadai terhadap responden untuk mengisi instrument data mutu Operator bekerja dengan cermat Kepala sekolah memberikan perhatian terhadap kinerja operator

K. Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan

Pada proses verifikasi dan validasi data, secara umum dapat ditemukan ketidaksesuaian data dengan kondisi yang sebenarnya serta dibuatkan solusinya seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Verifikasi dan Validasi 8 Standar Nasional Pendidikan

No	Standar	Data yang belum valid	Permasalahan/Solusi
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan (pada beberapa sekolah nilainya 7) Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap dan keterampilan (nilainya 7)	Sekolah belum mengisi data dengan benar, karena nilai pengetahuan berasal dari data PMP dan dapodik. Dari dapodik, seharusnya sekolah melakukan input data nilai rata-rata raport untuk semua jenjang dan semua kelas, selain itu sekolah harus menginput nilai rata-rata UN dan tingkat kelulusan. Sedangkan dari PMP sekolah perlu memasukkan pengakuan capaian prestasi tingkat kewilayahan. Dengan demikian capaian nilai pengetahuan tidak mungkin 7 (karena sama artinya dengan nilai 100) Memberikan saran kepada pihak sekolah, untuk memberikan informasi yang obyektif sesuai dengan butir pertanyaan. Pengisian jawaban hendaknya disesuaikan dengan rubrik dan bukti fisik yang ada.
2.	Standar Isi	2.1.4. Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa dan ruang lingkup pembelajaran Skor : 4.08	Nilai capaian diatas sudah sesuai dengan standar yang ditentukan namun guru belum memahami isian dari instrumen sehingga guru menjawab instrumen tidak berdasarkan bukti fisik yang ada Solusinya: memberikan pendampingan kepada guru – guru dalam pengisian instrumen PMP agar guru memahami proses pengisian sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

No	Standar	Data yang belum valid	Permasalahan/Solusi
3.	Standar Proses	3.1.3 Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis (6,65)	Nilai capaian 6,65 (prosentase capain 95%) menurut pemantauan pada supervisi tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Perlu dilakukan pendampingan dalam pengisian sesuai bukti fisik yang dimiliki guru.
		3.3.1 Melakukan Penilaian Otentik secara komprehensif (5,66	Nilai capaian 5,66 (prosentase pencapaian 81%) belum menunjukkan kondisi yang sesungguhnya pada proses penilaian oleh guru karena belum ada menggunakan angket, catatan anekdot, lembar observasi atau hasil analisis refleksi pada komponen kesiapan siswa, proses belajar dan hasil belajar siswa
4.	Standar Penilaian Pendidikan	4.1.1. Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan (sudah SNP)	Capaian sub indikator ini sudah SNP tetapi kenyataannya belum sesuai karena alat-alat tes yang digunakan guru belum banyak yang sesuai dengan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Begitu pula dengan instrumen penilaian belum dilengkapi dengan model rubriknya. Belum ada cara perumusan penetapan KKM yang diketahui siswa, tidak ada portofolio. dan belum terlihat semua guru mengembalikan hasil penilaian kepada siswa
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Belum tersedia Kepala Tenaga administrasi (nol)	Data ini tidak sesuai karena sekolah sudah memiliki KTU, tetapi dalam Dapodik tidak diinput karena belum menemukan menu input data SK KTU. Sehingga perlu diberikan pemahaman tentang cara untuk input pada data tendik ini.

No	Standar	Data yang belum valid	Permasalahan/Solusi
6	Sarana dan Prasarana	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar (nilainya 0)	Data ini tidak sesuai karena sebenarnya sekolah telah memiliki ruang pimpinan, tetapi tidak diinput secara lengkap. Solusinya memperbaiki isian data dapodik sesuai dengan kondisi riil sesuai bukti fisik yang ada.
		- Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai. (* : kosong) - Kondisi laboratorium kimia layak pakai (nilai = 0) - Memiliki tempat ibadah sesuai standar (nilai = 1,98 atau 28%)	• Pengisian data di Dapodik perlu di cermati • Kelengkapan peralatan dan bahan-bahan praktik agar diidentifikasi secara tepat dan di input pada Dapodik. • Perlu pengecekan kembali data pada Dapodik, mengingat sebagian besar Sekolah memiliki standar ukuran luas tempat ibadah (minimum 12 m²) sesuai dengan permen No.24 Tahun 2007 tentang Sarpras.
7	Standar Pengelolaan	Capaian 4 sub indikator pada indikator 7.3 tidak sesuai karena nilainya 0	Angka ini menunjukkan seolah-olah kepala sekolah tidak pernah melakukan supervisi, tidak mampu mengembangkan sekolah dengan baik, tidak memiliki jiwa kewirausahaan, dan tidak berkepribadian baik dan tidak bersosialisasi dengan baik. Solusinya adalah abaikan data tersebut, karena sumber datanya memang tidak tersedia.

No	Standar	Data yang belum valid	Permasalahan/Solusi
8	Standar Pembiayaan	8.3.1 Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/ APBN/Yayasan/ sumber lainnya (nilainya sangat kecil)	Pihak sekolah perlu memahami istilah Block Grand yang ada di dapodik. Sekolah perlu mengisi data dapodik dengan lengkap. Pengawas Sekolah perlu melakukan sosialisasi dan pendampingan pada saat pengisian Dapodik Pada SMA Provinsi Bali capaiannya (0.14), dimana hanya tiga sekolah yang menginput data alokasi dana yaitu SMA Satu Atap Tejakula, SMA 4 Denpasar, SMAS Darma Praja Denpasar. Berdasarkan pemantauan dan kenyataan yang ada sekolah mengatur berbagai alokasi dana yang bersumber dari APBD/APBN/ yayasan atau sumber lainnya. Pada konversi tercantum hanya penerimaan blockgrant saja, padahal sekolah menerima dana dari berbagai sumber.

**BAB
IV****PENUTUP****A. Simpulan**

Berdasarkan paparan pada Bab II dan Bab III maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Data Peta Mutu Pendidikan SMA Provinsi tahun 2018 diperoleh dari pendataan mutu pendidikan melalui perangkat Pendataan Mutu Pendidikan (PMP) dan data Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
2. Peta Mutu Pendidikan menyediakan informasi mutu pendidikan Provinsi Bali dapat digunakan sebagai basis data untuk merancang program peningkatan mutu pendidikan seluruh *stakeholders* pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
3. Terdapat beberapa data yang belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya disebabkan oleh komponen system pemetaan, petugas pemetaan dan responden.
4. LPMP mengawal pengisian instrumen PMP dengan benar, langsung dan jujur, agar rapor mutu yang dihasilkan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan RKS, serta agar intervensi yang diberikan pemerintah pusat maupun daerah tepat sasaran.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis peta mutu pendidikan pada Bab III, dapat direkomendasikan beberapa alternatif solusi peningkatan mutu pendidikan sesuai kondisi riil pada setiap Standar Nasional Pendidikan. Rekomendasi Peningkatan Mutu pendidikan dapat disajikan pada uraian berikut.

1. Peningkatan Mutu Standar Kompetensi Lulusan

- a. Perlu membuat program penyesuaian kualifikasi guru dengan mata pelajaran yang diampu.
- b. Perlu diberikan pelatihan peningkatan kompetensi pada mata pelajaran yang diampu.

- c. Perlu menerapkan pengaturan beban belajar antara tatap muka dan penugasan di sekolah, sehingga tidak memberatkan siswa.
- d. Perlu diberikan pelatihan terkait dengan gaya dan metode pembelajaran yang mengarah pada pengembangan bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.
- e. Perlu melengkapi sarana-prasarana pembelajaran yang lebih memadai.

2. Peningkatan Mutu Standar Isi

- a. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran (misalnya pelatihan, pendampingan, supervisi, studi banding, belajar mandiri, lesson study, dan sebagainya).
- b. Perlu membuat program pembelajaran dengan memperhatikan psikologis anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan serta fungsi dan lingkungan siswa.
- c. Mengaktifkan MGMP mapel di sekolah
- d. Memberikan penguatan pada guru tentang pemahaman karakteristik siswa.
- e. Memberikan penguatan kepada guru mengenai pemilihan materi ajar agar sesuai dengan ruang lingkup materi pembelajaran dan perkembangan psikologis siswa
- f. Guru dalam memberikan tugas tersruktur dan tidak tersruktur harus sesuai materi pembelajaran dan tahap perkembangan anak.
- g. Dalam menyampaikan materi pembelajaran, guru hendaknya menyesuaikan dengan perkembangan siswa yaitu pada konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional.
- h. Memberi penguatan pada guru pentingnya mengembangkan materi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, lingkungan siswa.

3. Peningkatan Mutu Standar Proses

- a. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam memahami penilaian otentik dengan baik.
- b. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengidentisi instrumen penilaian sehingga dapat memilih dan mengembangkan instrumen penilaian otentik.

4. Peningkatan Mutu Standar Penilaian

- a. Perlu mengadakan sosialisasi terkait peraturan yang terbaru secara rutin dengan program sistematis dan terencana.
- b. Perlu mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan penilaian termasuk penentuan kelulusan siswa.

5. Peningkatan Mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman kepala sekolah tentang kompetensi supervisi.
- b. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran dan paradigma kepala sekolah dalam pengembangan kompetensi supervisi.

- c. Perlu meningkatkan peran pengawasan dan pembinaan dari pengawas serta hasil supervisi dapat ditindak lanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.
 - d. Pemerintah pusat memberikan biaya pendidikan untuk Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi agar dapat meningkatkan kompetensinya
 - e. Kepala sekolah memperhatikan kompetensi Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi
 - f. Pemerintah pusat memprogramkan Diklat tenaga laboran aatau mengangkat tenaga laboran yang baru.
 - g. Memberikan biaya pendidikan untuk Tenaga laboran agar dapat meningkatkan kompetensinya
 - h. Kepala sekolah membuat usulan tenaga laboran atau meningkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan.
 - i. Pemerintah pusat memberikan biaya pendidikan untuk Tenaga Pustakawan agar dapat meningkatkan kompetensinya
 - j. Kepala sekolah memperhatikan kompetensi Tenaga Pustakawan
- 6. Peningkatan Mutu Standar Sarana dan Prasarana**
- a. Melakukan identifikasi terhadap kelengkapan peralatan dan bahan-bahan praktik dan diinput pada Dapodik.
 - b. Memprogramkan pengadaan bagi peralatan yang belum ada sesuai standar.
- 7. Peningkatan Mutu Standar Pengelolaan**
- a. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah
 - b. Sekolah perlu memprogramkan dalam RKAS kegiatan diklat atau workshop terkait dengan program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- 8. Peningkatan Mutu Standar Pembiayaan**
- a. Perlu penyiapan data keuangan yang lengkap baik itu ditinjau dari jumlah, jenis sumber penerimaan, waktu penerimaan
 - b. Perlu pendampingan oleh kepala sekolah dan bendahara penerimaan pada operator saat menginput alokasi sumber dana.
 - c. Perlu penambahan pemahaman bagi operator dalam memahami menu *Block Grant* pada menu sekolah di Aplikasi Dapodik

DAFTAR PUSTAKA

- Denim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung : Pustaka Setia
- Djaali. 2014. Psikologi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara
- Kemdikbud. 2017. Indikator Mutu dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
- Satori.2016. Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Jakarta : Alfabeta
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>
- <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id>
- <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>
- <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/>
- <http://statistik.data.kemdikbud.go.id>
- <http://npd.kemdikbud.go.id/>